

KERJASAMA UNTUK MENDAPATKAN VAKSIN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Lusiana Agustin¹

Abstract: This study aims to describe the cooperation carried out by Indonesia to obtain a vaccine in order to deal with the COVID-19 pandemic. The results of the study shows that Indonesia has problems in handling COVID-19, namely in terms of procuring vaccines to prevent the spread of the virus. Therefore, Indonesia cooperates both bilaterally with China and the UK as well as multilaterally through the Covax Facility, which is a vaccine grant scheme from developed countries to developing countries. Through this collaboration, Indonesia can finally meet the national vaccine needs.

Keywords: cooperation, Indonesia, COVID-19, vaccine

Pendahuluan

Awal tahun 2020 terjadi peristiwa penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh virus novel SARS-CoV-2 atau virus corona, yang kemudian disebut dengan COVID-19. Karena penyebaran yang sangat cepat dan pesat, *World Health Organization* (WHO) menetapkan peristiwa ini sebagai pandemi global. Virus ini dapat menular antarmanusia dan telah menyebar luas di Cina dan 190 negara lainnya. Kendati sumber kemunculannya belum dapat dipastikan, virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina, pada Desember 2019 ([CNN Indonesia, 2021](#)).

Pada 31 Desember, pemerintah Wuhan mengonfirmasi bahwa pejabat kesehatan tengah menangani belasan pasien yang menderita pneumonia misterius. Belum ada bukti ilmiah bahwa penyakit ini menular antar sesama manusia ([CNN Indonesia, 2021](#)). Cina telah memberikan peringatan dini kepada WHO terkait tentang kluster pneumonia misterius tersebut, namun belum mendeklarasikan penyakit ini sebagai wabah baru. Pada 9 Januari 2020, WHO mengumumkan bahwa virus corona misterius penyebab kluster pneumonia di Wuhan ([CNN Indonesia, 2021](#)).

Kemudian pada 12 Januari 2020 pemerintah Cina melaporkan kematian pertama akibat virus Covid-19, yaitu seorang pria lanjut usia berusia 61 tahun. Diketahui pria tersebut merupakan pelanggan setia pasar basah Huanan dan sebelum meninggal, lansia tersebut mengunjungi pasar Huanan. Setelah itu, warga lain yang berkunjung ke pasar Huanan juga mengalami gejala penyakit yang sama dengan korban meninggal. Hal ini menjadikan Pasar Huanan sebagai tempat awal penularan virus COVID-19 antarmanusia terjadi ([CNN Indonesia, 2021](#)). Pada 13 Januari 2020, kasus pneumonia misterius serupa kasus pertama di Wuhan terdeteksi di luar Cina, yakni Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

Akhir Januari 2020, WHO mendeklarasikan darurat kesehatan dunia. Pada 2 Februari 2020, seorang pria berusia 44 tahun di Filipina meninggal setelah terinfeksi virus COVID-19, menjadikannya sebagai kematian pertama di luar Cina akibat COVID-19. Pada saat yang sama, sebanyak 360 orang telah meninggal di Cina akibat infeksi COVID-19 ([CNN Indonesia, 2021](#)). Hingga 29 Maret 2020, angka yang terinfeksi mencapai 634.835 kasus dan total 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia ([WHO, 2020](#)).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: lusiana.agustin115@gmail.com

Dua kasus COVID-19 dilaporkan terjadi untuk pertama kali di Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020, di kota Depok, Jawa Barat, diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa virus corona dari Wuhan tersebut menjangkiti seorang putri berusia 31 tahun dan ibunya yang berusia 64 tahun. Kedua pengidap tersebut sempat melakukan kontak dengan WNA Jepang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Malaysia. Sejak kasus pertama tersebut diumumkan, angka positif COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan hingga 1.677 kasus pada April 2020 (Merdeka, 2020).

Akibat dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, terjadi penumpukan pasien di seluruh rumah sakit sehingga pemerintah membuat Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat. Pengidap COVID-19 yang jumlahnya ribuan dirawat pada empat tower, 4, 5, 6, dan 7, dengan total seluruh tempat tidur berjumlah 9.357 buah. Tingkat *Bed Occupancy Rate* (BOR) atau terisinya tempat tidur mencapai 55,29%. Jumlah tersebut BOR mendekati ambang batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 60% (CNN Indonesia, 2021).

Sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menekan angka terinfeksi Covid-19, presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai respons terhadap COVID-19 pada 31 Maret 2020. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan batasan aktivitas manusia dan barang-barang untuk masuk dan keluar dari wilayah masing-masing. Aktivitas antarwilayah dapat dilakukan hanya jika telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan. Peraturan pembatasan sosial tersebut juga termasuk pembatasan kegiatan pendidikan dan pemberlakuan *work from home* (WFH); pembatasan kegiatan ibadah dan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat-tempat atau fasilitas umum.

Pada tanggal yang sama, presiden Joko Widodo juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, yang berisi tentang pernyataan dan penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Pembuatan kedua peraturan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang mengatur ketentuan mendasar untuk PSBB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, “Pemerintah Indonesia memiliki kesiapan dan perlengkapan yang memadai untuk menangani kasus virus COVID-19. Pemerintah juga berupaya untuk menekan penyebaran COVID-19.” Menurut Jokowi, kini pemerintah telah menyiapkan lebih dari 100 rumah sakit dengan ruang isolasi untuk menangani pasien yang terinfeksi COVID-19. Pemerintah Indonesia juga telah memiliki peralatan medis yang memadai sesuai standar internasional.

Pemerintah juga telah memiliki kesiapan dan menjamin ketersediaan anggaran sebesar Rp 35,1 triliun pada tahun 2020 untuk mengatasi dan mengantisipasi lonjakan COVID-19. Persiapan ini di antaranya pengobatan, penanganan, dan pencegahannya agar tidak terjadi persebaran masif hingga tidak dapat dikendalikan (Kemenkeu, 2020).

Pencegahan yang dilakukan adalah berupa pemberian vaksin atau vaksinasi COVID-19, di mana vaksinasi memiliki peran yang penting dalam upaya menghentikan laju penularan. Oleh karenanya, berbagai negara di dunia termasuk Indonesia menjadikan vaksin sebagai prioritas untuk menanggulangi COVID-19 yang telah menjadi pandemi global. Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu bagian dari upaya pengendalian wabah. Vaksinasi bertujuan untuk menekan transmisi dan penularan COVID-19, mengurangi gejala, menekan angka kematian, serta bertujuan untuk mencapai kekebalan komunal (*herd immunity*) (Kemenkeu, 2020).

Sekurang-kurangnya sekitar 70% dari keseluruhan populasi atau sekitar 182 juta masyarakat Indonesia harus mendapatkan dosis vaksin agar kekebalan komunal atau *herd immunity* dapat dibentuk. Oleh karenanya, pada tanggal 5 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Meski demikian, hal tersebut tetap menjadi masalah karena jumlah vaksin yang sangat terbatas. Nyaris semua negara di dunia bertujuan sama, yaitu menekan laju penyebaran dan penularan Covid-19, tetapi penyediaan vaksin yang sesuai standard dan telah lolos uji klinis masih sangat terbatas. Hal ini menimbulkan persaingan antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan dosis vaksin (Kemkes, 2020).

Pada tahun 2020, Indonesia membutuhkan sekurang-kurangnya 246 juta dosis vaksin untuk memenuhi target 67% sasaran masyarakat yang menerima. Hal ini dikarenakan ada dua tahap vaksin yang harus dipenuhi sehingga masing-masing orang akan menerima dua dosis vaksin. Namun, pada tahun 2021 Indonesia menganggarkan sejumlah 50,2 triliun untuk 423,8 juta dosis vaksin COVID-19 (Kemkes, 2020).

Dalam rangka memenuhi angka kebutuhan vaksin, Indonesia sendiri memiliki program pengembangan vaksin COVID-9 mandiri melalui lembaga riset dalam negeri, yaitu vaksin Merah Putih. Namun, karena kondisi darurat COVID-19, Indonesia juga melakukan berbagai kerja sama bilateral untuk mendapatkan vaksin, di antaranya kerja sama dengan Inggris dan juga Cina. Selain kerja sama bilateral, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam skema COVAX di mana Indonesia sebagai negara yang belum mampu menangani COVID-19 akan mendapatkan hibah vaksin.

Landasan Konseptual

Konsep Kerja Sama Internasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kerja sama Internasional, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan kerja sama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing.

Setiap pemerintah suatu negara melakukan pendekatan dan negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan dan menanggulangi masalah-masalah yang muncul di negaranya. Selain itu, pengumpulan bukti-bukti tertulis juga dilakukan agar setiap pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memberikan usulan, masukan, hingga mengakhiri perundingan, perjanjian, maupun kerja sama. Menurut K.J Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“(1) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu oleh semua pihak. (2) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. (3) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. (4) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. (5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan.” (Holsti, 1998)

Kerja sama internasional terjadi karena banyak negara dan bangsa yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nasional masing-masing sedangkan kebutuhan dan kepentingan nasional setiap negara tidak sama. Oleh karenanya, kerja sama internasional

biasanya berputar pada berbagai bidang, di antaranya ekonomi, politik, budaya, pertahanan, hingga bidang lingkungan hidup.

Pada umumnya kerja sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini terjadi sebab kerja sama bilateral dapat menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang bekerja sama dengan lebih cepat. Menurut K.J Holsti (1995), proses kerja sama atau kolaborasi terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional, atau global yang muncul dan memerlukan perhatian dari lebih satu negara. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lainnya:

“(1) Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerja sama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. (2) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. (3) Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. (4) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.” (Holsti, 1995)

Kerja sama pada umumnya memiliki unsur yang sama dengan perumusan kebijakan umum atau koordinasi kebijakan nasional yang terpisah dan dilakukan atas dasar multilateral. Terkadang kerja sama internasional ini mencakup rencana dan asal-usul yang tidak dikonsepsikan oleh pemerintah nasional tetapi oleh pejabat sipil internasional yang melakukan perundingan sebagai wakil dari negara tersebut. Selain itu dari kerja sama internasional ini dilanjutkan dengan dibuatnya perundingan dan perjanjian yang berlanjut. Ada 4 jenis kerja sama:

“(1) Kerja sama Global, yaitu kerja sama yang memadukan semua bangsa di dunia dan mempersatukan seluruh cita-cita bersama serta untuk menghindari disintegrasi internasional. (2) Kerja sama Regional, yaitu kerja sama antara negara-negara yang secara geografis berdekatan dan memiliki kesamaan pandangan ekonomi, politik, sosial, budaya dari negara-negara yang hendak bekerja sama tersebut. (3) Kerja sama Fungsional, yaitu kerja sama yang didasarkan pada fungsinya masing-masing. Biasanya kerja sama ini meningkatkan bidang-bidang tertentu, kerja sama tersebut akan melengkapi berbagai kekurangan pada masing-masing negara misalnya: ekonomi, politik sosial budaya, dan lingkungan hidup. (4) Kerja sama Ideologis, yaitu kerja sama yang dilakukan negara-negara yang menganut paham ideologi yang sama, dan bentuk kerja sama biasanya diberlakukan melalui suatu perjanjian.” (Holsti, 1995)

Salah satu bentuk kerja sama yaitu kerja sama fungsional berangkat dari pragmatisme pemikiran masyarakat akan adanya kemampuan tertentu pada masing-masing mitra dalam kerja sama. Dengan demikian kerja sama fungsional tidak mungkin terselenggara apabila di antara negara mitra kerja sama ada yang tidak mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik yang diharapkan darinya oleh yang lain. Adapun kendala yang dihadapi dalam kerja sama fungsional terletak pada ideologi politik dan isu-isu wilayah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang diperoleh melalui hasil telaah pustaka digital baik dari buku, jurnal, laporan, dokumen, dan sumber-sumber internet yang berisi data dan informasi yang relevan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Landasan konseptual yang digunakan adalah Konsep Kerja Sama Internasional.

Hasil dan Pembahasan

A. Masalah Penanganan Covid-19 di Indonesia

Januari 2021 menjadi periode pertambahan kasus positif virus Covid-19 yang sangat signifikan di Indonesia, dengan Jakarta sebagai provinsi dengan kasus paling banyak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dipublikasikan Humas BNPB pada 26 Januari 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 1.012.350. Jakarta tercatat sebesar 2.314 kasus positif corona, kemudian di Jawa Barat kasus positif mencapai 3.924 kasus baru, kemudian kasus terbanyak lain tercatat di Jawa Tengah dengan penambahan sebanyak 1.678. Selain ketiga provinsi tersebut, provinsi-provinsi lain di Indonesia juga mencatat penemuan kasus-kasus positif baru. Angka positif yang besar tersebut diiringi dengan sebanyak 820.356 orang yang sembuh dan total sebanyak 28.468 kasus pasien dilaporkan meninggal dunia ([Kompas, 2021](#)).

Melihat jumlah kasus positif yang mencapai satu juta tersebut, Menteri Kesehatan memberikan pernyataan bahwa masyarakat dan pemerintah harus bekerja ekstra untuk menyelesaikan pandemi. Tingkat penulsaan virus covid-19 harus lekas dihentikan dan ditekan melalui dijalankannya protokol kesehatan secara maksimal, yakni dengan memakai masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak aman atau tidak berkumpul. Selain menjaga potokol kesehatan untuk terus dijalankan, perlu dilakukan tes, tracing, dan isolasi mandiri. Tes dilaksanakan untuk mengecek dan mengonfirmasi masyarakat yang memiliki gejala dan diduga positif virus Covid-19. Tracing adalah program yang dilaksanakan untuk melacak masyarakat yang telah berkontak langsung dengan pasien yang dikonfirmasi positif Covid-19. Selanjutnya adalah isolasi mandiri, program dari Kementerian Kesehatan untuk mngurangi penularan Covid-19 dengan mengisolasi diri dan sebisa mungkin menghindari kontak dengan orang lain.

Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus Covid-19, pemerintah Indonesia melakukan upaya pencegahan melalui program vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah diberitakan telah membuka jalur kerja sama untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa wacana vaksinasi masyarakat Indonesia akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahapan ini telah melalui konsultasi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang memiliki tugas untuk memberik nasehat/advice kepada Menkes. Tahap pertama vaksinasi akan dilaksanakan mulai Januari sampai dengan April 2021 ([Tempo, 2021](#)).

Tahap pertama vaksinasi di Indonesia menargetkan tenaga kesehatan sejumlah 1,3 juta, petugas pelayanan publik atau petuas yang kesulitan menjaga jarak dalam pekejaannya sebanyak 17,4 juta, serta masyarakat berusia lanjut atau di atas 60 tahun sejumlah 21,5 juta orang. Sedangkan vaksinasi tahap dua dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022 dengan target masyarakat yang yang menerima adalah 63,9 juta orang yang memiliki risiko penularan Covid-19 yang tinggi, dengan kategori berdasarkan tempat tinggal maupun kelas ekonomi dan juga kelas sosial ([Tempo, 2021](#)).

Untuk memenuhi kebutuhan dosis dalam vaksinasi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan berbagai negara untuk penyediaan vaksin. Salah satunya adalah dengan Cina di mana Cina memproduksi vaksin Sinovac. Dalam proses uji klinis, efektifitas vaksin Sinovac adalah 78%, akan tetapi setelah adanya tambahan data penelitian, angka tersebut berubah menjadi 50,40% dan diumumkan pada bulan Januari 2021. Vaksin Sinovac telah mendapat persetujuan untuk digunakan dalam kondisi darurat pada kelompok dengan risiko tinggi di China sejak Juli 2020. Pada September 2020, Sinovac telah disuntikkan kepada 1.000 orang sukarelawan dengan hasil kurang dari 5% yang merasakan gejala ketidaknyamanan (Detik Health, 2020).

Selain Indonesia, negara-negara lain di wilayah Asia telah sepakat untuk menjalin kerja sama pembelian vaksin Sinovac, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Di Indonesia sendiri, vaksinasi nasional telah dimulai sejak 13 Januari 2021 dengan presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapat dosis vaksin, berlokasi di Istana Medeka (Siaran Pers Presiden RI, 2021). Vaksinasi tersebut menjadi penanda dimulainya vaksinasi nasional yang dilaksanakan secara massal dan gratis dalam rangka menyelesaikan masalah penyebaran dan penulaaan virus Covid-19. Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis vaksin yang diproduksi oleh CoronaVac dari Sinovac Life Science Co.Ltd., di mana perusahaan tersebut telah melakukan kerja sama dengan PT. Bio Farma (Persero) dan telah melewati tahap uji klinis yang melibatkan 1.620 sukarelawan di Bandung.

Sebenarnya, Indonesia juga telah mencoba untuk mengembangkan vaksin Covid-19 sendiri melalui konsorsium nasional. Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 tersebut terdiri dari kolaborasi antara Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kalbe Farma, para ahli dari berbagai perguruan tinggi, LPNK, dan Lembaga Bio Molekular (LBM) Eijkman (Siaran Pers Presiden RI, 2021).

Konsorsium tersebut dibuat dengan tujuan untuk pengembangan vaksin dan pembangunan kemandirian nasional untuk dapat memproduksi vaksin yang aman, efektif, dan dapat memenuhi kebutuhan vaksin nasional. Cara pengembangan yang dilakukan adalah melalui sub-unit protein rekombinan yang menggunakan strain coronavirus yang berasal dari Indonesia. Metode ini sangat sesuai dengan teknologi dan pengalaman yang dimiliki oleh LBM Eijkman sebagai lembaga penelitian yang mendapat kewenangan untuk pengembangan vaksin nasional (Siaran Pers Presiden RI, 2021).

Mengembangkan vaksin mandiri yang diberi nama vaksin Merah Putih ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk menangani Covid-19 dalam jangka panjang, terutama mengusahakan penemuan vaksin yang sesuai dengan jenis virus yang tersebar di Indonesia. Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dan memberi arahan secara langsung untuk dilakukan kerja sama mengembangkan vaksin nasional secara mandiri. Arahan dan instruksi tersebut diberikan dalam rangka menguatkan dukungan keamanan kesehatan penduduk Indonesia dan mempercepat penanganan Covid-19. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengembangan vaksin Merah Putih tersebut.

Meski telah diupayakan untuk mengembangkan vaksin mandiri, Indonesia masih belum siap untuk memproduksi vaksin massal yang sesuai dengan standard maupun uji klinis yang sesuai dengan WHO, sehingga dibutuhkan vaksin yang telah lolos uji klinis dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral untuk mendapat dosis vaksin agar vaksinasi nasional dapat dilaksanakan.

B. Kerja Sama untuk Mendapatkan Vaksin

1. Kerja Sama Antara Indonesia dengan Cina

Diplomasi antara Indonesia dan Cina seputar penanganan Covid-19 telah dimulai sejak Februari 2020 ketika Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menghubungi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjadjaitan, di mana menteri Luhut menyatakan simpati atas wabah di Wuhan, Cina. Kemudian Presiden Cina, Xi Jinping menghubungi Presiden Joko Widodo dan menyatakan bahwa Cina akan bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani Covid-19 (FMPRR, 2020).

Kemudian pada Maret 2020 pembahasan mengenai kerja sama antara kedua negara berlanjut di tingkat kementerian. Menteri Wang Yi mengontak Menteri Luhut dan Menteri Retno, Menteri Luar Negeri Indonesia, untuk membicarakan penanganan penyebaran virus Covid-19. Pembahasan kerja sama ini dilanjutkan pada bulan April 2020 dalam rangka peringatan 70 tahun kerja sama antara Indonesia dan Cina. Keduanya berkomitmen untuk terus melakukan kerja sama, termasuk dalam mengatasi wabah pandemi global (FMPRR, 2020).

Juni 2020 Indonesia dan Cina sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan vaksin untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Selanjutnya pada Agustus 2020 kedua negara menandatangani MoU kerja sama pengembangan vaksin melalui Bio Farma (Indonesia) dan Sinovac (Cina). Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Sinovac akan menyedikana vaksin untuk Bio Farma.

Ada dua perjanjian yang ditandatangani, yang pertama adalah Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid-19 Vaccine yang berisi tentang penyediaan 40 juta dosis vaksin dari Sinovac untuk Indonesia selama periode November 2020 sampai Maret 2021. Perjanjian yang kedua adalah komitmen penyediaan vaksin massal selama periode 2021. Desember 2020 tahap pertama pengiriman vaksin dari Cina ke Indonesia sampai dan mulai disebarkan ke masyarakat Indonesia melalui program vaksinasi. Hingga Maret 2021, sebanyak lebih dari 5,4 juta dosis vaksin Sinovac telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia (Bisnis.com, 2021).

Ada alasan dibalik pemilihan Bio Farma dan Sinovac sebagai pelaksana kerja sama antara kedua negara. Bio Farma merupakan perusahaan yang dapat mengembangkan vaksin dan telah memiliki reputasi terpercaya dalam produksi vaksin. Metode pengembangan vaksin Bio Farma juga serupa dengan metode yang dilakukan oleh Sinovac, oleh sebab itu Bio Farma menjadi pelaksana yang tepat untuk kerja sama bilateral dengan Cina. Selain dengan Sinovac, Bio Farma juga bekerja sama dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI). Selain Bio Farma, anak perusahaannya yaitu PT Kalbe Farma juga bekerja sama dengan Genexine Consortium Korea Selatan untuk mengembangkan vaksin (Tempo, 2020). PT BCHT Bioteknologi Indonesia juga bekerja sama dengan China Sinopharm International Corporation.

Sedangkan untuk Sinovac, perusahaan ini sangat tanggap untuk mengembangkan vaksin Covid-19 dan uji klinis terhadap vaksin produksi Sinovac berjalan dengan lancar. Sinovac telah mendapatkan izin untuk menjadi vaksin darurat untuk tenaga kesehatan agar dapat mencegah penularan virus. Sinovac juga menyatakan kesiapan dalam produksi vaksin Covid-19 hingga 1 miliar dosis yang akan disebar ke seluruh dunia per tahunnya. Oleh karena itu, Sinovac menjadi pilihan yang tepat karena dunia sedang mengalami pandemi sehingga dibutuhkan dosis vaksin yang mampu memenuhi permintaan agar percepatan penanganan Covid-19 dapat dilakukan, termasuk di Indonesia.

Persebaran Covid-19 yang masif memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian, kesehatan komunal, dan stabilitas nasional. Oleh sebab itu, Indonesia harus melakukan kerja sama dengan Cina agar Covid-19 di Indonesia dapat ditangani dan vaksin dapat dikembangkan secara maksimal. Cina adalah salah satu penanam modal atau investor dan partner dagang utama Indonesia. Sedangkan bagi Cina, Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk-produk yang diproduksi oleh Cina. Baik Cina maupun Indonesia saling membutuhkan untuk berlangsungnya kegiatan ekonomi dalam negerinya. Hal ini menjadi dasar kedua negara untuk saling membantu dalam kerja sama pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19 nasional.

Juni 2020 perusahaan Sinovac Cina menyampaikan pengumuman bahwa uji klinis tahap awal dan kedua pada vaksin Covid-9 telah membawa hasil yang memuaskan. Sehingga pengujian klinis bagi vaksin untuk tahap yang ketiga di luar Cina telah memiliki izin dari administrasi nasional untuk produk medis atau National Medical Product Administration (NMPA) Cina.

Pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 oleh Cina tergolong sangat cepat. Hal ini membuat Indonesia memutuskan untuk berkerja sama dengan Cina dalam mengembangkan vaksin. Kedua negara tersebut telah menjalin kesepakatan untuk kerja sama lewat Sinovac dan Bio Farma. Kedua perusahaan tersebut dikenal sebagai produsen obat-obatan dan telah mendapat pengakuan dari WHO karena keduanya telah menguasai metode dan teknik pengembangan vaksin.

Pandemi global membuat masyarakat di seluruh dunia banyak yang kehilangan mata pencaharian dan menimbulkan dampak terhadap perkembangan ekonomi dunia. Selain memberikan dampak pada ekonomi, Covid-19 juga menimbulkan dampak pada kesehatan, oleh sebab itu dibutuhkan imunitas agar masyarakat dapat melaksanakan aktivitas seperti semula dan kegiatan ekonomi kembali dilaksanakan. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas adalah dengan vaksinasi agar target herd immunity dapat terpenuhi.

Selain ketersediaan vaksin untuk menjalankan program vaksinasi nasional, kesediaan masyarakat Indonesia untuk vaksin juga menjadi indikator yang penting dalam kesuksesan pencapaian target herd immunity. Banyak masyarakat Indonesia yang menolak untuk divaksin sehingga hal ini akan mempersulit pemerintah untuk mencapai target vaksinasi. Penolakan ini dikarenakan masyarakat banyak yang mempertanyakan keabsahan uji klinis vaksin karena produksinya yang tergolong cepat dan percobaan uji klinis tahap ketiga yang memiliki hasil rendah. Meski demikian, pemerintah Indonesia memberi imbauan kepada masyarakat untuk vaksin, bahwa vaksin telah lolos uji klinis dan aman digunakan.

Meski Indonesia berupaya menyediakan dan memproduksi vaksin Covid-19 sendiri, hal itu masih belum dapat diwujudkan, sehingga Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara yang mampu memproduksi vaksin dengan skala besar, salah satunya adalah Cina melalui Sinovac. Hal ini menjadi upaya jangka pendek yang dinilai bijak karena pola persebaran virus Covid-19 sangat cepat, membuat Indonesia harus cepat tanggap untuk menjalin diplomasi dan kerja sama dengan Cina agar kekebalan komunal masyarakat Indonesia dapat tercipta melalui program vaksinasi massal. Dengan demikian, pandemi Covid-19 di Indonesia dapat lebih mudah ditangani dan terkendali.

2. Kerja Sama Antara Indonesia dengan Inggris

Diplomasi untuk menjalin kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Inggris telah dimulai sejak 2020. Pada 12 Oktober 2020 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan

Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke Inggris untuk melakukan pertemuan kerja. Indonesia yang diwakili oleh dua menteri tersebut bertemu dengan Menlu Inggris, yaitu Dominic Raab dan juga pihak-pihak yang berwenang dalam Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (Liputan6, 2020). Menlu Retno menyebutkan bahwa bertemunya perwakilan Indonesia dengan Menlu Inggris adalah tahap yang penting dalam penguatan kerja sama Indonesia dan Inggris, baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama antara negara-negara di dunia perlu dijalin dengan kuat agar pandemi Covid-19 dapat teratasi bersama.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk besar, Indonesia harus menyelesaikan dan menekan laju penularan Covid-19 karena keberhasilan Indonesia akan memberikan dampak yang signifikan. Perusahaan BUMN Indonesia, Bio Farma, ditempatkan sebagai perusahaan atau organisasi yang kompeten dalam mengembangkan vaksin untuk menekan penularan Covid-19. Hal ini merupakan bentuk apresiasi dari Inggris dan beberapa negara lain yang tergabung dalam CEPI terhadap upaya Indonesia dalam menghadapi pandemi (Liputan6, 2020).

Pada kesempatan tersebut, pertemuan dengan para petinggi AstraZeneca berjalan dengan sangat baik. Pihak AstraZeneca menyambut dengan baik permintaan vaksin dari Indonesia. Pengiriman vaksin periode pertama diharap dapat dilakukan pada awal tahun 2021 dan dilakukannya secara bertahap. Menteri Retno Marsudi menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki ketertarikan untuk bekerja sama dan berkolaborasi secara strategis dan berjangka panjang dengan Indonesia. Pertemuan tersebut juga diakhiri dengan sebuah kesepakatan, yakni dengan ditandatanganinya Letter of Intent (LOI) (VOA Indonesia, 2020) tentang pengadaan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Kemudian pada 30 Desember 2020, Indonesia memesan lagi vaksin Covid-19 dengan jumlah yang cukup besar. Pemerintah Indonesia memesan vaksin AstraZeneca sejumlah 50 juta dosis karena vaksin tersebut menurut Inggris telah melewati dan lolos uji klinis di banyak negara. Vaksin Covid-19 yang telah lolos uji klinis tersebut menandakan bahwa vaksin AstraZeneca telah aman dan bisa jadi efektif untuk disuntikkan ke masyarakat umum. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa Indonesia telah menandatangani kerja sama untuk pemasokan vaksin dari Novavax dan AstraZeneca dengan melakukan penandatanganan kerjasama suplai vaksin dari Novavax dan AstraZeneca dengan total sebanyak 100 juta dosis masing-masing 50 juta dosis (Merdeka, 2020).

Selanjutnya pada pertemuan Republik Indonesia – United Kingdom Partnership Forum ketiga yang dilaksanakan April 2021, Menlu Retno Marsudi mengajak Inggris memperkuat kerja sama melawan pandemi Covid-19, terutama untuk membangun ketahanan dan industri perawatan kesehatan karena Inggris adalah mitra yang tepat untuk mengembangkan area kerja sama ini, seperti yang dikutip dari Menlu Retno saat menyampaikan keterangan pers setelah bertemu Menlu Inggris, Dominic Raab, di Jakarta (Katadata, 2021).

Indonesia mengharapkan Inggris untuk terus menunjukkan dukungan dalam pelaksanaan kerja sama multilateral untuk penyediaan vaksin dan meminta kesiapan mereka untuk berbagi vaksin dengan negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan Indonesia dengan mempertimbangkan posisi Inggris sebagai salah satu penyedia dosis vaksin yang besar bagi Indonesia. Menlu RI Retno Marsudi bersama COVAX AMC Engagement Group, mengharapkan dukungan Inggris dalam program berbagi vaksin yang dibentuk oleh WHO. Bagi Menlu Retno, mendukung kerja sama untuk pemerataan

akses vaksin bagi negara-negara miskin dan berkembang anggota COVAX merupakan tanggung jawab bersama.

Sejalan dengan semakin pentingnya isu kesehatan, Menteri Retno mengusulkan untuk memasukkan sektor kesehatan sebagai salah satu bagian penting dalam forum kemitraan Indonesia-Inggris. Beberapa kerja sama yang mulai digarap bersama oleh kedua negara antara lain: penelitian dan pengembangan industri kesehatan dan farmasi, serta kerja sama produksi vaksin. Sementara itu, Raab menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia dan memuji peran Menlu RI yang ikut memimpin upaya global untuk memastikan kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara.

Raab menyatakan bahwa sebanyak 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca telah dikirimkan ke Indonesia melalui COVAX dan menjadi salah satu negara yang menerima pengiriman vaksin gelombang pertama. Raab juga menjelaskan, sebagai salah satu pendonor terbesar COVAX, Inggris ikut menyumbang untuk mengamankan 1 juta dosis vaksin Covid-19 untuk skema global tersebut dan telah membantu mengumpulkan US\$1 miliar (sekitar Rp14,5 triliun) melalui pendanaan yang cocok dengan negara-negara donor lainnya. Inggris juga memberikan kontribusi 5 juta pound sterling (sekitar Rp99,7 miliar) untuk respon kesehatan dan ekonomi Association of South East Asia Nations (ASEAN) terhadap Covid-19 dan 1 juta pound sterling (sekitar Rp20 miliar) untuk ASEAN Covid-19 Response Fund ([Media Indonesia, 2021](#)).

Selama kunjungannya ke Jakarta, Menlu Inggris juga akan bertemu dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, untuk membahas pentingnya kerja sama internasional dalam kesiapsiagaan pandemi serta kerja sama bilateral bidang kesehatan antara kedua negara, termasuk dalam bidang telemedicine, penelitian melalui pendanaan pemerintah Inggris, Newton Fund, serta sekuensing genom melalui pendanaan Inggris, Fleming Fund.

Pertemuan bilateral juga berlangsung pada 29 Juni 2021 di mana Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menyebut pemerintah Inggris akan memberikan kontribusi terkait vaksin Covid-19 kepada Indonesia. Retno mengatakan hal itu disampaikan Menlu Inggris Dominic Rabb kepada dirinya saat pertemuan bilateral usai pertemuan Menlu G20 di Italia. Retno menuturkan konfirmasi vaksin dari Inggris merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif yang dilakukan oleh dua Menlu dalam beberapa kali pertemuan.

Selanjutnya Menlu Retno menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, Elizabeth Truss di Jakarta pada 11 November 2021. Kunjungan ini, diantaranya, untuk membangun kerja sama di bidang keamanan dan ekonomi. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris telah sepakat bahwa mereka perlu memperkuat kerja sama dalam menyediakan vaksin Covid-19 dan membangun sistem imun global. Menteri Luar Negeri RI juga secara khusus menyatakan bahwa Indonesia sangat menghargai dukungan dari Inggris atas penyediaan satu juta dosis vaksin yang diberikan melalui dose-sharing ([Beritasatu, 2021](#)).

Untuk kerja sama berjangka panjang, Indonesia dan Inggris mencoba untuk membangun ketahanan kesehatan secara nasional, regional, maupun global, di antaranya melalui penguatan kerja sama dalam bidang farmasi dan berusaha menjadikan Indonesia sebagai produsen vaksin untuk wilayah ASEAN, sehingga Inggris memberikan dukungan berupa bantuan finansial. Menlu Inggris Elizabeth Truss juga menekankan bahwa Inggris berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama dan memastikan bahwa negara-negara di dunia terutama negara miskin dan berkembang untuk mendapatkan akses ke vaksin. Sehingga dengan demikian semua negara akan memiliki akses yang merata dan dapat melakukan vaksinasi untuk menangani pandemi Covid-19.

3. Kerja Sama COVAX Facility

Menlu Indonesia Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Tohir telah melakukan sejumlah pertemuan luar negeri, termasuk Swiss dengan berbagai pihak. Pertemuan tersebut dilaksanakan pada 16 Oktober 2020 dalam skema pertemuan bilateral dan multilateral. Indonesia melakukan pertemuan dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta di Swiss membawa misi untuk bekerja sama dalam pengadaan vaksin Covid-19. Selain itu, Indonesia juga turut serta dalam pertemuan multilateral dengan CEO GAVI COVAX Facility, Seth Barkley dan Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, serta sejumlah perwakilan dari UNICEF (Beritasatu, 2021).

Pertemuan-pertemuan tersebut ditujukan agar negara-negara dan pihak-pihak yang terlibat menjalin komunikasi secara intensif untuk menangani pandemi COVID-19 dan kerja sama strategis lainnya. Indonesia yang diwakili dua menteri memberikan dukungan terhadap potensi kerja sama multilateral dan bahwa Indonesia bersedia menjadi bagian negara dalam skema kerja sama COVAX Facility (Beritasatu, 2021).

Dalam pertemuan dengan petinggi GAVI, Indonesia menyatakan bahwa presiden Jokowi telah mendapatkan surat dari GAVI tertanggal 18 Desember 2020, di mana surat tersebut berisi tentang kelayakan Indonesia dalam menerima *Official Development Assistance* (ODA) dalam skema kerja sama multilateral COVAX Facility untuk hibah vaksin. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyatakan bahwa mereka telah mengupayakan berbagai hal untuk dapat mendapatkan vaksin dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di dalam negeri (CNBC Indonesia, 2020).

Menindaklanjuti surat dari GAVI, dalam pertemuan tersebut secara resmi Indonesia juga menyampaikan surat resmi yang berisi tentang Expression of Interest dari untuk bergabung dalam skema COVAX Facility. Menlu Retno juga menyampaikan bahwa kerja sama pengadaan vaksin secara multilateral harus menjadi pembahasan yang konsisten karena penanggulangan pandemi merupakan tanggung jawab secara global dan Indonesia akan terus memantau perkembangan pengembangan maupun distribusi vaksin tersebut (CNBC Indonesia, 2020).

Indonesia dan WHO telah sepakat untuk turut bekerja sama, berkomunikasi, dan berkolaborasi dalam menanggulangi pandemi serta menjalin kerja sama strategis lain dalam bidang kesehatan. Wakil Menteri BUMN Indonesia, Budi Gunadi, telah bertemu dengan delegasi UNICEF dalam pembahasan tentang pengadaan dan distribusi vaksin COVID-19 dari COVAX Facility untuk Indonesia. Termasuk di antaranya tentang hal-hal krusial dalam kelancaran distribusi vaksin dan vaksinasi di Indonesia, seperti infrastruktur, regulasi, dan ketersediaan tenaga kesehatan demi kelancaran proses vaksinasi nasional. Pertemuan tersebut adalah tindak lanjut dari ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan UNICEF di Jakarta pada 15 September 2020 (UNICEF, 2020).

Menlu Retno juga menyampaikan bahwa perjalanan dinas tim Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN ke Inggris dan Swiss merupakan salah satu upaya dan komitmen Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 dengan mengusahakan pengadaan vaksin. Yakni dengan menjalin kerja sama strategis secara bilateral maupun multilateral untuk mendapatkan vaksin, di antaranya termasuk kerja sama dengan organisasi internasional seperti WHO, GAVI, CEPI, dan UNICEF (Republika, 2020). Berbagai kerja sama tersebut dapat terlaksana karena Indonesia, melalui BUMN Bio Farma, memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalin kerja sama riset strategis jangka panjang dengan organisasi-organisasi tersebut. Indonesia telah menunjukkan dan

mendukung multilateralisme dengan berupaya menyediakan vaksin untuk semua orang (*vaccine for all*).

Melalui skema COVAX Facility, Indonesia telah berhasil mendapatkan 20% dosis vaksin dari total keseluruhan kebutuhan nasional. Indonesia juga berhasil menjadi *bridge builder*, yakni menjadi jembatan bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mendapat dosis vaksin secara merata. Menlu Retno menyatakan bahwa pada kuartal ketiga 2021 ketimpangan vaksin antara negara maju dan negara-negara miskin sangat besar, yaitu sekitar 6,7 miliar dosis telah diberikan untuk negara maju sedangkan negara miskin hanya mendapatkan akses ke vaksinasi kurang dari 1% (Grehenson, 2021).

Menlu Retno, yang menjabat sebagai ketua bersama dalam *COVAX Advance Market Commitment Engagement Group* (AMC EG), bersama ketua lainnya, yaitu Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia, memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Indonesia telah mengupayakan diplomasi vaksin agar lebih banyak negara miskin yang mendapatkan akses vaksin, sekurang-kurangnya 20% dari total populasi, secara gratis melalui skema hibah vaksin (Grehenson, 2021).

Selain melalui skema multilateral, COVAX Facility juga memberikan fasilitas kerja sama bilateral kepada anggota-anggotanya melalui skema *vaccine swap*, *dose sharing*, dan bantuan teknis berupa pengadaan alat-alat kesehatan dan vaksin (Tempo, 2021). *Vaccine swaps* adalah skema di mana negara-negara maju memberikan hibah vaksin kepada negara-negara miskin dengan mengalihkan dosis vaksin yang seharusnya diberikan untuk mereka ke negara-negara yang belum mendapatkan dosis pertama. Hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan produsen-produsen vaksin dapat menjamin ketersediaan stok vaksin untuk seluruh negara yang bersedia mengalihkan stok vaksin mereka. Sedangkan *dose sharing* adalah skema berbagi atau hibah vaksin antarnegara, terutama dari negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi ke sebagian besar penduduknya ke negara-negara yang lebih membutuhkan atau darurat vaksin COVID-19. Skema *dose sharing* ini salah satunya diterima Indonesia dengan banyaknya bantuan atau hibah vaksin yang cukup besar dari negara-negara donatur.

Sebagai pengukuran terhadap capaian kerja sama vaksin yang telah dilakukan Indonesia, penulis menunjukkan capaian dosis vaksin yang diperoleh Indonesia dalam angka. Pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat 30 Maret 2022 yang lalu, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa (Dirjen Amerop) Kemlu, I Gede Ngurah Swajaya, menyampaikan bahwa sampai 28 Maret 2022, secara total hibah vaksin yang telah diterima Indonesia adalah sebanyak 505.551.435 dosis vaksin COVID-19 (Kumparan, 2022).

Total rincian vaksin yang telah diterima Indonesia adalah Sinovac (295.512.280 dosis), AstraZeneca (104.731.390 dosis), Pfizer (63.253.425 dosis), Moderna (23.780.340 dosis), Covavax (9 juta dosis), Sinopharm (8.450.000 dosis), dan Johnson&Johnson (824.000 dosis). Dari total jumlah tersebut, 25% vaksin COVID-19 di Indonesia (125.863.185 dosis) didapatkan secara gratis, terdiri dari skema multilateral dari COVAX Facility (99.139.705 dosis) dan skema bilateral dengan *dose-sharing* (26.723.480 dosis) (Kumparan, 2022). Donasi vaksin terbesar yang diterima Indonesia berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Australia, Jepang, Prancis, Belanda, Italia, RRC, Inggris, dan UAE. Kerja sama multilateral untuk memperoleh vaksin yang dilakukan Indonesia melalui Covax Facility dapat dikatakan sangat efektif dan berhasil. Indonesia mendapatkan banyak bantuan vaksin dan proses pengiriman vaksin ke Indonesia tergolong cepat.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan global yang harus ditangani dan dihentikan laju penyebarannya agar tidak menginfeksi semakin banyak orang, termasuk Indonesia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah dalam berbagai bidang terutama perekonomian. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk penanganan Covid-19 agar dapat terkendali, salah satunya adalah dengan penyuntikan atau vaksinasi massal supaya tercipta kekebalan komunal (herd immunity).

Dalam jangka panjang, Indonesia berupaya untuk dapat mandiri dengan mencoba dan mengembangkan vaksin dalam negeri, yaitu vaksin Merah Putih. Namun, hal tersebut tidak dapat direalisasikan dengan cepat karena vaksin membutuhkan beberapa tahap uji klinis sedangkan penyebaran infeksi virus Covid-19 sangat cepat. Oleh karena itu, Indonesia mengupayakan diplomasi dan kerja sama dengan beberapa negara dalam pengadaan vaksin Covid-19 agar target vaksinasi nasional dapat tercapai. Upaya-upaya tersebut di antaranya adalah kerja sama dengan Cina, Inggris, dan Swiss, yakni negara-negara yang mampu memproduksi vaksin secara massal untuk memenuhi kebutuhan global, termasuk Indonesia.

Daftar Pustaka

- COVID-19 Indonesia mencapai setengah juta kasus positif, Diakses melalui, <https://www.bbc.com>
- Holsti, K. J. 1998. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid II*. Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia-China Tandatangani Kerja Sama soal Vaksin hingga OBOR, Diakses melalui, <https://money.kompas.com/read/2021/01/13/170700026/indonesia-china-tandatangani-kerja-sama-soal-vaksin-hingga-obor?page=all>,
- Jejak Pandemi COVID-19, dari Pasar hingga Mengepung Dunia, Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-COVID-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia> (15/3/2022, 00.01WIB)
- Kemendes Laporkan Upaya Pemerintah dalam Menyediakan Akses Vaksin COVID-19, diakses melalui <https://www.kemdes.go.id/article/view/20101500002/>
- Kronologi lengkap virus corona masuk Indonesia, Diakses melalui <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>
- Krisis Rumah Sakit, diakses melalui <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5ff87b84e440a/krisis-rumah-sakit-COVID-19>
- Kronologi Munculnya COVID-19 Di Indonesia Hingga Terbit Keppres Darurat Kesehatan Diakses melalui, <https://www.merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-COVID-19-di-indonesia-hingga-terbit-keppres-darurat-kesehatan-kln.html>
- Pasien Covid Dirawat Di Wisma Atlet Kemayoran Diakses melalui, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220203090523-20-754408/pasien-covid-dirawat-di-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5-ribu-orang>

- Pemerintah Indonesia dan Swiss Menandatangani MoU Kerja Sama Penanggulangan Bencana diakses melalui <https://bnpb.go.id/berita/pemerintah-indonesia-dan-swiss-menandatangani-mou-kerja-sama-penanggulangan-bencana>
- Penanggulangan Pandemi COVID-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, diakses melalui <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-COVID-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-COVID-19>
- Perwita, A.A.B. dan Yani, Y. M. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- RI-Inggris Sepakat Perkuat Kerja Sama Atasi Pandemi dan Terorisme, Diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2347/berita/ri-inggris-sepakat-perkuat-kerja-sama-atasi-pandemi-dan-terorisme>
- Rochmadi, N.W. 2008. *Hubungan dan Organisasi Internasional*. Malang: P4TK PKn dan IPS.
- World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report, Diakses melalui, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>